



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Selasa, 23 September 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA							
FORMULIR BERITA							
Register No :							
PANGGILAN		JENIS		NOMOR			
DARI : MENTERI DALAM NEGERI							
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA							
TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI							
KLASIFIKASI : BIASA							
Nomor : 500.2.3/5173/SJ							
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA							
AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SELASA TGL 23 SEPTEMBER 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA							
BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA							
CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA							
SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE BERSAMA FORKOPIMDA PROV KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA							
DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE BERSAMA FORKOPIMDA KAB GARING KOTA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA							
TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA							
EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA							
LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI DRESS CODE PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA							
DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA							
EEE TTK DUM TTK HBS							
TANGGAL PEMBUATAN 21 September 2025							
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL		No. Kode		Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal <u>Tomsy Tohir</u>				Terima	Kirim		
Tanda Tangan							

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi (via zoom)

Hari/Tanggal : Selasa / September 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Fahri LURAHMAN	Bag Eko & SDA	L	1
2	Indra	— II —		2
3	Abdussamed	Disperum	L	3
4	Siti Fauziah	Bappariidn	P	4
5	Jumiatu	DISDAS PERIA		5
6	Eddy Rahmat	BPS		6
7	HTRXASI	DISDAS PERIA	L	7
8	Arief R.M	BPKAD	L	8
9	Dina	UMUM		9
10	Yana	Eko & SDA		10
11	ENDAH	Eko & SDA		11
12	Rudin	— II —		12
13	Devi			13
14	Ido	umum		14
15	FIKRI	— II —		15
16	Rahman	umum		16
17	ANNA	— II —		17
18	Dino	umum		18
19	Hika			19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/5173/SJ Tanggal 21 September 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Selasa, 23 September 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Berdasarkan data harga komoditas pangan pada minggu ke-2 September, yang terdapat 109 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Terdapat 93 daerah yang mengalami kenaikan harga beras selama 2 minggu berturut-turut dan 16 daerah yang baru mengalami kenaikan harga.
 - b) Pelaksanaan GPM didasarkan pada prosedur yang selama ini sudah berjalan. Harapannya kegiatan ini dilakukan secara intensif dan masif kepada masyarakat, sehingga daerah yang terdampak akan keluar dari daftar daerah yang mengalami kenaikan harga beras.
 - c) Pada tahun 2025, puncak panen jagung berada di bulan Februari dan Maret 2025, diperkirakan akan terjadi kembali panen yang cukup besar di bulan September namun jumlahnya tidak sebesar Feb-Mar. Total stok CJP saat ini 72 ribu ton.
 - d) Stimulus ekonomi TW II tahun 2025 memutuskan penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu paket kebijakan untuk penebalan bantuan sosial.
 - e) Pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras untuk MBR selama 2 bulan (Okt-Nov).
 - f) BAPANAS bersama stakeholder lainnya selalu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui pangan murah, realisasi GPM bulan Jan-Sep 2025 sebanyak 8.660 kali
 2. **BADAN PUSAT STATISTIK**
 - a) Pada M3 September 2025, tercatat 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 15 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah dan daging ayam ras.
 - b) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M3 September 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.
 - c) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Takalar dengan nilai perubahan IPH 1,87%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras, dan beras

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

3. BULOG

- a) Program SPHP dilaksanakan kembali mulai bulan Juli hingga Desember 2025 dengan total pagu sebesar 1,5 juta ton. Rata-rata penyaluran SPHP per hari mencapai 2.000 s.d 9.000 ton
- b) Lebih dari 43 ribu ton beras SPHP didistribusikan dalam kegiatan GPM di 5.709 titik yang tersebar di seluruh Indonesia
- c) Tantangan pelaksanaan SPHP 2025 yaitu setok dan preferensi konsumen (pulen atau pera). Serta biaya distribusi beras SPHP di daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal) serta wilayah sulit lainnya relatif tinggi akibat tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi yang terbatas,
- d) Pemerintah melalui Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, Pemerintah Daerah serta sejumlah BUMN pangan bersinergi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia dengan menyalurkan lebih dari 20 ribu ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

4. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Inflasi daerah dipengaruhi oleh berbagai persoalan strategis seperti hambatan distribusi pangan, praktik spekulasi dan penimbunan, indikasi pungutan liar, serta potensi penyalahgunaan anggaran yang membutuhkan pengawalan/pendampingan hukum agar tidak menimbulkan beban yang lebih besar bagi masyarakat.
- b) Kejaksaan memiliki peran penting tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mengawal kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
- c) Pemerintah daerah bersama TPID perlu memperkuat sistem pengawasan distribusi barang pokok dan mengefektifkan operasi pasar, dengan pendampingan hukum dari kejaksaan agar pelaksanaannya akuntabel dan tetap sasaran.
- d) Perlunya meningkatkan penegakan hukum baik preventif maupun represif terhadap praktik-praktik curang di pasar sekaligus memperluas edukasi hukum kepada pelaku usaha agar tercipta iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

5. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Rata-rata harga minyak goreng pada minggu ketiga September 2025 dibandingkan bulan sebelumnya yaitu kemasan premium (tidak diregulasi) Rp.22.357/liter (-0,10%) dan minyakita Rp.16.682/liter (0,06%).
- b) Harga minyak goreng kemasan tercatat stabil dan dapat ditahan dengan adanya minyakita.
- c) Pergerakan harga nasional minyakita dipengaruhi adanya fluktuasi harga di beberapa wilayah antara lain wilayah timur dan wilayah lainnya, dimana perlu dukungan komitmen dan konsistensi pasokan dari produsen – BUMN ke pasar rakyat.
- d) Realisasi DMO bulan Agustus sebesar 194.060 ton dan per 22 September sudah terealisasi 103.234 ton seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

6. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Strategi operasional peningkatan produksi padi:
- Melakukan pengawalan dan pendampingan penanaman padi di seluruh areal sawah mulai dari bulan Mei 2025 dst.
 - Mengoptimalkan kinerja pompanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan khususnya pada areal sawah tadah hujan di wilayah masing-masing.
 - Seluruh bantuan APBN untuk pompa air, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan agar digunakan untuk kegiatan penanaman padi di wilayah masing-masing
 - Melakukan pengawalan dan pendampingan percepatan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah rakyat bagi daerah yang mendapat kegiatan dimaksud sekaligus mengawal percepatan tanamnya di wilayah masing-masing.
 - Percepat tanam sehingga jarak panen ke tanam maks 14 hari meingkatkan indek pertanaman dan provitas.
 - Mekanisasi panen dan pasca panen sehingga menurunkan losis dibawah 5%.
 - Memperlancar penyerapan gabah petani sehingga harga gabah stabil diatas Rp.6.500/kg.
- c) Rekomendasi kebijakan peningkatan produksi dan pengendalian inflasi cabai dan bawang merah:
- Meningkatkan luas tanam cabai dan bawang merah secara mandiri baik melalui alokasi APBD ataupun memanfaatkan Dana Desa (20% untuk ketahanan pangan) dan sumber- sumber dana lainnya (CSR Perusahaan dsb) dengan memperhatikan kebutuhan bulanan, ketersediaan lahan, kesesuaian agroklimat, musim tanam, teknologi budidaya, penanganan pascapanen hingga pemasaran
 - Melakukan Kerjasama Antara Daerah (KAD) melibatkan para Champion berupa kerjasama pemenuhan pasokan dan/atau pendampingan teknis budidaya
 - Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana produksi benih dan tanaman yang sudah diberikan melalui fasilitasi APBN dan DAK Fisik seperti Nurseri, Screen house, GH sederhana dll untuk memproduksi benih semai dan pertanaman cabai dan bawang merah
 - Mendorong Kelompok-Kelompok P2L yang pernah diberikan bantuan melalui APBN dan DAK Non Fisik untuk terus melakukan pertanaman cabai dipekarangan dan demplot masing-masing

7. KANTOR STAF PRESIDEN

- a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 19 September 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	-	Daging Sapi, Kedelai	Cabai Rawit Merah
	Waspada	-	Gula Pasir Curah	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras
	Tidak Aman	-	-	Beras Medium (Zona 3), Bawang Putih, Minyakita, Jagung Tk Peternak

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 12 September 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	9	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Yahukimo	9	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Intan Jaya	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab. Pegunungan Bintang	6	Bawang Merah, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mappi	6	Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Lanny Jaya	4	Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Merauke	3	Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Poternak
Kab. Paniai	2	Bawang Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Dogiyai	2	Bawang Merah, Bawang Putih
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Mamberamo Raya	2	Bawang Putih, Daging Ayam Ras
Kab. Deiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Asmat	2	Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Mimika	2	Minyakita, Jagung Tk Poternak
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Poternak
Kab. Bulungan	2	Kedelai, Daging Sapi
Kab. Karimun	2	Jagung Tk Poternak, Daging Sapi

8. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR). KEMENDAGRI dan KEMENPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.
- Pemerintah daerah wajib ikut serta menyukseskan program 3 juta rumah sebagai PSN (Pasal 67 UU No.23 tahun 2014).
- Bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan, akan menerima sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali hingga penonaktifan sementara hingga pemberhentian kepala daerah. (Pasal 68 UU No.23 Tahun 2014)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
- Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
- Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
- Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
- Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
- Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

9. SATGAS PANGAN POLRI

- Upaya Satgas Pangan Polri dalam pengendalian inflasi:
 - Berkoordinasi dengan seluruh dirkrimsus jajaran (kasatgasda) terkait perkembangan beras nasional.
 - Satgasda melakukan pengecekan dari hulu hingga hilir.
 - Program menjaga stabilitas, ketersediaan dan intervensi harga melalui

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

penyaluran beras SPHP oleh seluruh jajaran baik ditingkat mabes, polda, polres hingga polsek.

b) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu:

- memperkuat pengawasan distribusi dan penyaluran beras bantuan pangan, beras SPHP, minyakita dan gula dengan melibatkan K/L, pemerintah daerah dan satuan wilayah. Guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga di tingkat masyarakat serta menjamin ketepatan sasaran dalam pendistribusiannya.
- Satgasda bersama-sama dengan BULOG dan pemerintah terus meningkatkan kegiatan GPM.
- Satgasda bersama-sama instansi terkait untuk turun langsung mengecek dan melakukan penyelidikan terkait info rembesan gula rafinasi di pasar dan lakukan tindak tegas bila menemukan penyimpangan.

10.KEMENTRIAN DALAM NEGERI

- a) Peringkat inflasi Indonesia berada di peringkat 76 dari 186 negara di dunia
- b) Atensi 10 Pemda dengan IPH tertinggi/terendah pada minggu III September dibandingkan minggu II September 2025

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)		KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (KENAIKAN PADA MINGGU II SEPTEMBER 2025)	KETERANGAN
	MINGGU II SEPTEMBER	MINGGU III SEPTEMBER		
KAB. LIMA PULUH KOTA	5.87	7.58	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, BERA	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KOTA PADANG PANJANG	5.25	6.20	CABAI MERAH, BERA	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB. TAPANULI TENGAH	5.96	6.08	CABAI MERAH, MINYAK GORENG, TELUR AYAM RAS	Telah Melaporkan 6 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KOTA TEBING TINGGI	4.44	5.47	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, CABAI RAWIT	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB. ASAHAN	4.2	5.39	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, DAGING SAPI	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB. MANDAILING NATAL	4.81	5.39	CABAI MERAH, JERUK, DAGING AYAM RAS	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB. AGAM	5.13	5.29	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, CABAI RAWIT	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KOTA PARIAMAN	4.09	5.23	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, MINYAK GORENG	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB. PESIR SELATAN	3.99	5.03	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, BERA	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB. TAPANULI UTARA	4.76	5.01	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, TELUR AYAM RAS	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi
KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)		KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (PENURUNAN PADA MINGGU III SEPTEMBER 2025)	
	MINGGU II SEPTEMBER	MINGGU III SEPTEMBER		
KAB. WAKATOB	-4.2	-4.15	BERAS, CABAI MERAH, CABAI RAWIT	
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-4.07	-3.99	CABAI MERAH, BERA	
KAB. KONawe SELATAN	-1.44	-3.41	BERAS, DAGING AYAM RAS, CABAI MERAH	
KAB. KUTAI TIMUR	-3.09	-3.32	BERAS, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT	
KAB. TORAJA UTARA	-3.26	-3.15	BERAS, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH	
KAB. MAMBERAMO RAYA	-2.09	-2.62	DAGING AYAM RAS, MINYAK GORENG, TELUR AYAM RAS	
KAB. KONawe KEPULAUAN	-2.68	-2.61	BERAS, IKAN KEMBUNG, IKAN GEMBUNG, IKAN BANYAR, IKAN GEMBOLO, IKAN ASO-ASO, SUSHI, BUBUK UNTUK BALITA	
KAB. BURU	-2.22	-2.58	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BERA	
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	-2.5	-2.56	BAWANG MERAH, DAGING SAPI, CABAI MERAH	
KAB. BOVEN DIGOE	-2.26	-2.52	BERAS, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH	

c) Arahan dan penekanan dari Mendagri:

- Secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi atau anev pengendalian inflasi daerah
- Memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan pengecekan ke lapangan/pasar.
- Perlu merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga.
- Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan BTT.
- Melakukan langkah yang lebih proaktif, konkrit dan cepat

11.TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d September 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, serbuan teritorial, operasi teritorial dan pendampingan petani maupun Kementan
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI sudah bangun 6 kodam, 10 brigif TP, 55 BTP dan kompi produksi ketahanan pangan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk monitor serta bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Pada minggu ke-3 September 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Banjarbaru mencatat deflasi sebesar -0,80. Penurunan harga tersebut dipengaruhi terutama oleh komoditas:
 - Bawang Merah : -0,9282
 - Beras : -0,8505
 - Telur Ayam Ras : -0,1563Kondisi ini menunjukkan adanya pelemahan harga pada komoditas pangan utama. Meski deflasi dapat menguntungkan konsumen, namun secara jangka panjang perlu diwaspadai karena dapat menurunkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha, serta menekan daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan 6 upaya konkret pengendalian inflasi secara penuh.
- 3) Memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan stok barang pokok.
- 4) Menyelenggarakan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala, guna memastikan setiap langkah pengendalian inflasi berjalan terarah, cepat, serta melibatkan seluruh pihak terkait.
- 5) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani).
- 6) Menyelenggarakan pasar murah atau operasi pasar saat terjadi lonjakan harga.
- 7) Memanfaatkan media lokal untuk publikasi harga acuan, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH.
- 8) Memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pemberdayaan petani, peningkatan produksi, pembangunan sentra pangan, serta perbaikan sistem logistik dan distribusi.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (23 September 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru